

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Era Digital dan Pembangunan Berkelanjutan

Kahar Gani¹, Makmur Jaya², Darmawati³

Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia^{1,3}

Universitas Indonesia Timur, Indonesia²

Email Korespondensi Author: kahargani070@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Kepemimpinan
Pemerintahan;
Pemerintahan Digital;
Transformasi Digital;
Pembangunan
Berkelanjutan.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan pemerintahan digital yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan mengintegrasikan agenda digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintah di era digital dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, melibatkan analisis sistematis artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai kepemimpinan digital, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong transformasi digital di birokrasi. Ini berkontribusi pada inovasi layanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan inklusi sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan digital berperan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui teknologi data. Namun, transformasi digital menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kajian ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan dalam memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan dukungan struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keywords:

Government Leadership;
Digital Government; Digital
Transformation;
Sustainable Development.

Abstrack

The development of digital technology has brought significant changes in government management through the implementation of digital government that emphasizes efficiency, transparency, and accountability. However, the success of digital transformation does not only depend on existing technology, but also on the quality of leadership that is capable of managing change and integrating the digital agenda with sustainable development goals. This study aims to examine the role of government leadership in the digital era and its impact on economic, social, and environmental aspects of sustainable development. The method used is a qualitative approach with a literature review, involving a systematic analysis of related journal articles, books, and policy reports. The data were analyzed thematically to identify patterns and key findings regarding digital leadership, digital government, and sustainable development. The results show that visionary, adaptive, and collaborative digital leadership is essential in driving digital transformation in the bureaucracy. This contributes to public service innovation, data-driven decision-making, and increased social inclusion and public trust. Digital leadership plays a role in sustainable environmental management through data technology. However, digital transformation faces challenges such as the digital literacy gap, resistant organizational culture, and infrastructure and budget constraints. This study emphasizes the importance of government leadership in ensuring effective and sustainable digital transformation, and recommends strengthening digital leadership capacity and structural support to achieve sustainable development goals.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang cepat telah membawa dampak besar dalam pengelolaan pemerintahan di berbagai negara. Transformasi digital mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai pemerintahan digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (OECD, 2020). Dalam konteks ini, kepemimpinan pemerintahan menjadi faktor penting yang menentukan arah dan keberhasilan transformasi digital.

Di sisi lain, dunia saat ini juga menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin rumit, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (UNDP, 2019). Digitalisasi pemerintahan dianggap sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan inovatif diperlukan untuk memandu perubahan organisasi, mengatasi resistensi birokrasi, serta memastikan integrasi kebijakan digital dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Mergel, Edelman, & Haug, 2019). Tanpa kepemimpinan yang kuat, transformasi digital berisiko berjalan setengah hati dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks negara berkembang, tantangan kepemimpinan pemerintahan di era digital semakin kompleks. Kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi isu utama (World Bank, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat memperlebar ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Selain itu, era digital juga membawa risiko baru dalam pengelolaan pemerintahan, seperti ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan etika penggunaan teknologi. Kepemimpinan pemerintahan dituntut untuk tidak hanya mendorong inovasi digital, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan teknologi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan (Fountain, 2018). Ini menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan aspek efisiensi, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang kepemimpinan pemerintahan dalam era digital dan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana peran dan karakteristik kepemimpinan pemerintahan dapat memaksimalkan manfaat transformasi digital sekaligus meminimalkan risikonya, sehingga pemerintahan digital benar-benar berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan yang adil dan berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan telaah penelitian sebelumnya, beberapa studi telah membahas kepemimpinan pemerintahan di era digital, namun sebagian besar masih terfokus pada aspek transformasi digital dan peningkatan layanan publik. Sugiyanto (2025) menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan sektor publik agar lebih adaptif, berbasis data, dan kolaboratif untuk meningkatkan efisiensi layanan. Namun, penelitian tersebut belum secara eksplisit mengaitkan transformasi kepemimpinan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, sehingga kurang menyoroti dampak kepemimpinan digital terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Setiadi (2025) menyoroti peran kepemimpinan digital dalam mempercepat transformasi layanan publik melalui kebijakan teknologi, komunikasi, dan kolaborasi organisasi. Meskipun relevan dengan pemerintahan digital, penelitian ini masih terbatas pada peningkatan kualitas layanan dan belum menghubungkannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Yunas dkk. (2024) yang menekankan penguatan kapasitas kepemimpinan digital di pemerintahan desa. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, tetapi belum mengkaji bagaimana kepemimpinan digital dapat mengarahkan proses digitalisasi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, studi Aliy, Younus, dan Lawelai (2025) menghubungkan kematangan digital institusi dengan transformasi berkelanjutan, tetapi fokus utamanya lebih pada tingkat kesiapan digital organisasi dan bukan pada peran kepemimpinan sebagai penggerak utama. Penelitian Bridging Digital Gaps in Smart City Governance menunjukkan bahwa kepemimpinan digital memoderasi hubungan antara kesiapan teknologi dan kinerja pemerintahan kota, namun penelitian tersebut masih belum menekankan dampak terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam kerangka SDGs. Adapun studi tinjauan literatur Springer Nature (2024) menekankan pentingnya e-governance dalam pencapaian SDGs, namun tidak membahas secara spesifik peran kepemimpinan pemerintahan sebagai variabel utama dalam proses pemerintahan digital.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara eksplisit mengintegrasikan kepemimpinan pemerintahan, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak hanya menilai bagaimana pemimpin pemerintahan mengelola transformasi digital, tetapi juga menelaah bagaimana kepemimpinan tersebut mampu mengarahkan digitalisasi untuk mendukung dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dengan menyajikan kontribusi teoritis dan praktis terkait peran kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemerintahan digital.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa kajian pustaka (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan dari kajian ini adalah untuk mendalami secara komprehensif konsep, teori, dan temuan terkait kepemimpinan pemerintahan di era digital serta hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kajian pustaka memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian, teori, serta kebijakan yang relevan, sehingga dapat membangun kerangka konseptual yang kokoh. Kajian literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan dalam penelitian, serta merumuskan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

Sumber data dalam kajian ini mencakup literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dengan kepemimpinan pemerintahan di era digital serta pembangunan berkelanjutan, seperti artikel jurnal, buku, bab buku, dan laporan dari organisasi internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengorganisasikan sumber-sumber literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Proses pengumpulan data meliputi identifikasi, pemilihan, dan pengambilan data dari berbagai sumber literatur yang memenuhi kriteria kajian.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari literatur yang telah dipilih. Proses ini dimulai dengan pengorganisasian literatur, dilanjutkan dengan pengkodean awal untuk menemukan konsep dan pola yang relevan. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan diringkas menjadi tema besar seperti visi digital, inovasi layanan publik, inklusi sosial, dampak lingkungan, dan tantangan kepemimpinan digital. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk memahami hubungan antar konsep serta implikasinya terhadap teori dan praktik, sehingga menghasilkan sintesis temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Diskusi

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Mengelola Transformasi Digital

Pemimpin pemerintahan memegang peran kunci sebagai pengarah visi digital yang menentukan arah dan keberhasilan transformasi digital dalam birokrasi. Visi digital berfungsi sebagai panduan bagi semua inisiatif digital, termasuk pengembangan roadmap, kebijakan teknologi, dan koordinasi antar unit organisasi (Bharadwaj et al., 2013; Westerman et al., 2014). Kajian literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan digital tidak hanya terkait dengan keterampilan teknis dalam penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk merumuskan visi transformasi yang menyeluruh dan memimpin perubahan budaya organisasi (Kane et al., 2015). Tanpa kepemimpinan yang solid dan visi yang jelas, transformasi digital sering kali berlangsung lambat, tidak terarah, dan kurang terintegrasi dengan tujuan organisasi secara keseluruhan (Vial, 2019). Hal ini sering kali menghambat efektivitas reformasi birokrasi digital, karena transformasi digital membutuhkan arahan strategis yang jelas dari

para pemimpin untuk mengintegrasikan teknologi dengan optimal dalam proses layanan publik (Mergel et al., 2019).

Kepemimpinan digital juga berperan penting dalam mendorong budaya inovasi di dalam organisasi pemerintahan. Budaya inovasi tidak hanya menekankan pada penerapan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, peningkatan kreativitas dalam pelayanan, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan baru di era disrupsi (Schein, 2010; Westerman et al., 2014). Pemimpin yang efektif dapat memotivasi pegawai untuk berpikir kreatif, memberikan penghargaan atas inisiatif digital, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung eksperimen dan pembelajaran teknologi (Kotter, 1996; Gawer & Cusumano, 2014). Temuan dari berbagai studi literatur menegaskan bahwa budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan digital merupakan syarat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital (Bharadwaj et al., 2013; Mergel et al., 2019).

Dalam konteks manajemen perubahan, pemimpin pemerintahan berfungsi sebagai fasilitator utama yang memastikan semua pegawai memahami tujuan dan manfaat dari transformasi digital (Kotter, 1996; Armenakis & Bedeian, 1999). Resistensi budaya kerja menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan transformasi digital di sektor publik, sehingga pemimpin perlu merancang strategi komunikasi yang jelas dan melibatkan pegawai secara aktif (Kane et al., 2015; Prosci, 2020). Dengan demikian, mereka dapat membangun rasa memiliki dan mempercepat adopsi teknologi digital di semua tingkatan organisasi (Kotter, 1996; Armenakis & Bedeian, 1999). Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemimpin dalam menangani resistensi dan memfasilitasi komunikasi internal adalah faktor penting dalam keberhasilan proses digitalisasi birokrasi (Mergel et al., 2019; Vial, 2019).

Selain itu, pemimpin pemerintahan bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia. Literasi digital, pemahaman terhadap teknologi informasi, dan keterampilan abad ke-21 menjadi faktor kunci keberhasilan digitalisasi birokrasi (OECD, 2019; World Economic Forum, 2020). Program pelatihan yang diprakarsai oleh pemimpin tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan sistem digital, tetapi juga memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi tuntutan operasional yang semakin kompleks (Kane et al., 2015). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital ini mempercepat kemampuan aparatur dalam memanfaatkan alat digital secara optimal untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas (Mergel et al., 2019; Vial, 2019).

Peran pemimpin juga meluas ke kolaborasi dan sinergi antar unit internal serta dengan aktor eksternal, seperti sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Transformasi digital sering kali memerlukan integrasi sistem dan data yang kompleks, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting untuk memperkuat ekosistem digital pemerintahan (Bharadwaj et al., 2013; Gawer & Cusumano, 2014). Pemimpin yang mampu memfasilitasi hubungan antarpemangku kepentingan ini berfungsi sebagai katalisator dalam menciptakan layanan digital yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi silo birokrasi yang menghambat integrasi data dan proses kerja (Mergel et al., 2019; Westerman et al., 2014).

Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data menjadi ciri khas kepemimpinan digital yang efektif. Penggunaan big data dan analisis data dalam perencanaan kebijakan membantu meningkatkan kualitas perencanaan, memperbaiki akurasi prediksi hasil kebijakan, dan memperkuat proses evaluasi serta koreksi program (Davenport & Harris, 2007; McAfee & Brynjolfsson, 2012). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, tetapi juga memperkuat efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan (OECD, 2019). Literasi data di kalangan pemimpin menjadi elemen penting, karena proses perumusan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris cenderung menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan warga (Kane et al., 2015; Vial, 2019).

Namun, terdapat sejumlah tantangan struktural yang menghambat pelaksanaan transformasi digital meskipun dipimpin oleh pemimpin yang visioner. Beberapa isu signifikan yang diidentifikasi dalam kajian penelitian meliputi kesenjangan digital antar wilayah dan unit kerja, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, resistensi budaya organisasi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran untuk program digital, serta kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi (OECD, 2019; World Economic Forum, 2020; Vial, 2019). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kepemimpinan yang kuat, tetapi juga

memerlukan dukungan struktural seperti kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur yang memadai, dan pembangunan kapasitas organisasi yang berkelanjutan (Bharadwaj et al., 2013; Mergel et al., 2019).

Akhirnya, dampak positif dari kepemimpinan digital terhadap kinerja pemerintahan juga terlihat dalam berbagai studi akademis. Pemimpin yang efektif dalam mengelola transformasi digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi layanan publik, percepatan birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan (OECD, 2019; Mergel et al., 2019). Organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang mengedepankan kepemimpinan digital juga menunjukkan adaptasi yang lebih kuat terhadap lingkungan digital yang dinamis, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan cepat (Kane et al., 2015; Westerman et al., 2014). Temuan ini sejalan dengan hasil studi literatur yang menyatakan bahwa kepemimpinan digital mempercepat transformasi digital dan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih tinggi (Vial, 2019; Mergel et al., 2019).

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Mengarahkan Digitalisasi untuk Mendukung Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Temuan kajian mengindikasikan bahwa kepemimpinan digital memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi layanan publik yang berbasis digital. Pelaksanaan layanan terpadu dan otomatisasi proses birokrasi yang dipimpin oleh individu visioner telah terbukti meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pemerintahan. Hal ini mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik serta mempercepat perkembangan ekonomi digital. Selain itu, kepemimpinan digital juga berperan dalam mendorong inovasi dan efisiensi di dalam organisasi pemerintahan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa *e-government* yang dipimpin oleh pemimpin visioner dapat mengurangi beban informasi dan memperkuat dukungan terhadap inovasi ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya pada kinerja ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan (Li & Zhang, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemerintahan digital berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembentukan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif (Sugiono, 2021).

Dalam aspek sosial, kepemimpinan dalam digitalisasi pemerintahan terbukti mendukung upaya inklusi sosial serta memperluas akses layanan yang adil bagi seluruh masyarakat. Pemerintah yang menerapkan *e-government* secara transparan dan mudah diakses dapat menjembatani kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan digital menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan digital, karena partisipasi publik meningkatkan relevansi kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam layanan digital secara langsung meningkatkan kepuasan publik dan mengurangi kesenjangan layanan, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses (Sekaran, L., Utami, R., & Prasetyo, A., 2025). Lebih lanjut, kepemimpinan digital yang responsif dan komunikatif terbukti memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel (Aditya et al., 2024).

Dalam konteks lingkungan, penelitian ini mengidentifikasi peran pemimpin pemerintahan sebagai pengarah utama dalam integrasi teknologi digital yang ramah lingkungan. Pemimpin yang visioner mampu mengarahkan pemanfaatan solusi digital, seperti sensor *Internet of Things (IoT)* untuk memantau kualitas udara, sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan kerusakan lingkungan, serta audit karbon elektronik sebagai alat untuk mengukur jejak emisi. Selain itu, penggunaan big data menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti untuk kebijakan lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan responsif terhadap dinamika perubahan ekosistem. Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan *e-governance* yang dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan dapat berkontribusi pada pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui peningkatan transparansi dan penyediaan data yang akurat untuk indikator lingkungan (Springer, 2024).

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan dalam mengarahkan digitalisasi memiliki peran penting dalam mendukung dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam dimensi ekonomi, kepemimpinan digital mampu mendorong peningkatan efisiensi dan inovasi yang memperkuat pertumbuhan ekonomi serta daya saing. Dalam

dimensi sosial, kepemimpinan digital memperkuat inklusi layanan publik, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan dalam dimensi lingkungan, integrasi teknologi digital mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih akurat dan berbasis bukti, sehingga mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan. Dengan demikian, kepemimpinan digital bukan hanya sekadar kemampuan dalam mengelola teknologi, tetapi juga merupakan strategi holistik yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Kepemimpinan Pemerintahan Di Era Digital

Temuan kajian mengungkapkan bahwa kepemimpinan pemerintahan di era digital menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks, baik dari aspek internal organisasi maupun faktor eksternal yang ada di lingkungan. Kepemimpinan digital seringkali terhambat oleh kesenjangan dalam literasi digital dan kemampuan teknologi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Meskipun infrastruktur dan alat digital telah tersedia, tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang cukup untuk memanfaatkannya secara optimal. Situasi ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penerapan sistem digital, yang berdampak negatif pada efektivitas layanan publik. Selain itu, kurangnya kompetensi digital juga berdampak pada rendahnya adopsi inovasi, karena pegawai sering merasa tidak siap menghadapi perubahan teknologi (Kane et al., 2015; OECD, 2019).

Adanya resistensi budaya organisasi sebagai penghalang utama dalam proses transformasi digital. Budaya birokrasi yang masih berfokus pada prosedur, hierarki, dan ketidakberanian terhadap risiko membuat proses perubahan digital berjalan lambat dan terpecah-pecah. Pegawai sering kali enggan meninggalkan cara kerja lama, terutama ketika perubahan teknologi dianggap sebagai ancaman terhadap rutinitas atau posisi mereka. Hal ini menyebabkan transformasi digital tidak berlangsung secara konsisten dan kurang mampu mendorong perubahan perilaku organisasi secara mendasar (Kotter, 1996; Armenakis & Bedeian, 1999).

Kepemimpinan pemerintahan di era digital juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam mengembangkan infrastruktur teknologi serta program digital yang berkelanjutan. Investasi dalam bidang digital memerlukan biaya yang signifikan, mulai dari pengadaan perangkat keras, pengembangan sistem, hingga pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menyebabkan proyek digital terhenti di tengah jalan atau tidak berkelanjutan, sehingga mengganggu konsistensi proses transformasi (Mergel et al., 2019; Vial, 2019).

Tantangan struktural seperti kesenjangan infrastruktur teknologi antar wilayah menjadi hambatan yang signifikan. Pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam jaringan internet, listrik, dan perangkat digital mengalami kesulitan dalam menerapkan layanan digital secara merata. Kondisi ini memperlebar kesenjangan layanan antara daerah yang maju dan yang tertinggal, sehingga tujuan pemerataan layanan publik melalui digitalisasi sulit untuk dicapai (OECD, 2019; World Economic Forum, 2020).

Aspek keamanan data dan privasi menjadi tantangan yang sangat penting bagi kepemimpinan pemerintahan. Transformasi digital meningkatkan volume data publik yang harus dikelola dengan aman, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem keamanan informasi dan regulasi perlindungan data. Kekhawatiran mengenai kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi publik berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, pemimpin perlu memastikan penerapan standar keamanan yang tinggi serta kebijakan perlindungan data yang jelas dan tegas (Davenport & Harris, 2007; McAfee & Brynjolfsson, 2012).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa lambatnya perubahan regulasi dan kebijakan menjadi penghalang bagi inovasi digital. Proses legislasi yang panjang dan regulasi yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi baru menyebabkan pemerintah kesulitan dalam merespons perubahan digital dengan cepat, sehingga kebijakan digital sering kali tertinggal dari dinamika teknologi. Kondisi ini berdampak pada ketidakselarasan antara kebutuhan teknologi dan kerangka regulasi yang ada (Bharadwaj et al., 2013; Westerman et al., 2014).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan di era digital tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan strategis dalam mengelola perubahan organisasi, membangun budaya inovasi, serta memastikan dukungan sumber daya dan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, pemimpin perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang

adaptif, kolaboratif, dan visioner agar proses transformasi digital dapat berlangsung secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kajian ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam pemerintahan memainkan peran penting dalam mengarahkan serta mengelola transformasi digital birokrasi yang berkelanjutan. Kepemimpinan digital mencakup kemampuan untuk merumuskan visi transformasi yang menyeluruh, memimpin perubahan budaya organisasi, mendorong inovasi dan kolaborasi antar sektor, serta mengembangkan kompetensi digital pada sumber daya manusia dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Peran ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kepemimpinan digital terbukti mendukung dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan melalui penguatan daya saing ekonomi, peningkatan inklusi dan kepercayaan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berbasis teknologi dan data. Namun, pelaksanaan transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap perubahan budaya organisasi, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, risiko keamanan data, serta regulasi yang belum cukup adaptif. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kepemimpinan yang visioner, tetapi juga memerlukan dukungan struktural yang memadai. Berdasarkan temuan ini, kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital, pemerataan infrastruktur dan akses digital, percepatan adaptasi regulasi, penguatan budaya organisasi, kolaborasi antar sektor, serta pengembangan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang dampak kepemimpinan digital terhadap kinerja pemerintahan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Aditya, R., Pranoto, H., & Lestari, D. (2024). Digital leadership and public trust in e-government implementation. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(2), 85–101.
- Aliy, A., Younus, M., & Lawelai, H. (2025). Digital maturity and sustainable transformation in public institutions. *Journal of Governance and Digital Transformation*, 6(1), 1–15.
- Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. *Journal of Management*, 25(3), 293–315.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business School Press.
- Fountain, J. E. (2018). *Building the virtual state: Information technology and institutional change* (2nd ed.). Brookings Institution Press.
- Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 31(3), 417–433.
- Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. *MIT Sloan Management Review*, 14(1), 1–25.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business School Press.
- Li, X., & Zhang, Y. (2024). E-government, green innovation, and sustainable public sector performance. *Sustainable Development*, 32(1), 55–70.

- McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big data: The management revolution. *Harvard Business Review*, 90(10), 60–68.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- OECD. (2019). *Digital government review: Building digital government strategies for better public governance*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Digital government index 2019: Results and key findings*. OECD Publishing.
- Prosci. (2020). *Best practices in change management*. Prosci Research.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Sekaran, L., Utami, R., & Prasetyo, A. (2025). Citizen participation in digital public services and social inclusion. *Journal of E-Government Studies*, 9(1), 23–38.
- Setiadi, B. (2025). Kepemimpinan digital dalam transformasi layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45–60.
- Springer Nature. (2024). E-governance and sustainable development goals: A systematic review. *Sustainability Science Review*, 18(2), 211–230.
- Sugiyanto. (2025). Transformasi kepemimpinan sektor publik di era digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 101–117.
- Sugiono, D. (2021). Digital government and economic competitiveness in developing countries. *Journal of Development Policy*, 7(3), 201–218.
- UNDP. (2019). *Digital strategy 2019–2021*. United Nations Development Programme.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Publications.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report*. World Economic Forum.
- Yunas, N. S., Rahman, A., & Putra, M. R. (2024). Digital leadership capacity in village governance. *Journal of Rural Governance*, 5(2), 67–83.